

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2 0 1 9



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	Kompas	Sindo	Tempo
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		Indopos	Pos Kota	Warta Kota

Dewan Sorot Pajak Hotel dan Hiburan

Pimpinan Dewan Ikut Sindir

JAKARTA - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI bersama anggota DPRD DKI Jakarta kembali menggelar rapat Badan Anggaran APBD 2020. Dalam rapat itu, wakil rakyat Kebon Sirih menyoroiti penurunan pendapatan pajak hotel dan hiburan.

Pada pemaparan yang ditampilkan Badan Pajak dan Retribusi DKI Jakarta APBD Perubahan 2019 untuk pendapatan pajak hotel sebesar Rp1,8 triliun. Namun, realisasinya hanya mampu Rp1,5 triliun. Begitu juga dengan pajak pendapatan hiburan, dalam APBD Perubahan 2019 sebesar Rp850 miliar sementara realisasi hanya Rp743 miliar.

Ketua Komisi C (bidang keuangan) DPRD DKI Jakarta Habib Muhammad Bin Salim Alatas mengatakan, target PAD DKI 2020 perlu dievaluasi secara objektif. Peralannya, hingga jelang akhir 2019 baru mencapai 72 persen dari target total PAD Rp44,54 triliun.

"Ya kami berharap agar pencapaian (PAD-red) bisa lebih maksimal lagi. Karena saat ini masih 72 persen. Padahal tahun anggaran 2019 dua bulan lagi akan berakhir," ungkap dia kepada INDOPOS di DPRD DKI, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (26/11/2019).

Target PAD DKI 2020, sambung Habib Muhammad, naik 11,18 persen mencapai Rp49,52 triliun yang didapat dari penyesuaian 13 jenis pajak. Angka ini naik dibandingkan target PAD DKI 2019 yang mencapai Rp44,54 triliun.

Dia menegaskan, penyesuaian pajak hiburan sebesar Rp850 miliar menjadi Rp1,1 triliun; pajak reklame sebesar Rp1,05 triliun menjadi Rp1,32 triliun; Pajak Penerangan Jalan (PPJ) sebesar Rp810 miliar menjadi Rp1,02 triliun, dan pajak parkir diproyeksikan naik sebesar Rp525 miliar menjadi Rp1,1 triliun.

Kepala Badan Pajak dan Retribusi, Faisal Syafruddin mengatakan, sejatinya tidak ada penurunan dari target

pendapatan. Adanya penurunan angka tergantung kondisi kemampuan ekonomi. "Tidak bisa menjadikan pajak itu tetap seperti transaksi BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, Red) yang sekarang ini turun karena kondisi ekonomi tadi 6,5 persen, sekarang turun hanya 5,6 persen jadi transaksi itu turun," kata Faisal kepada INDOPOS.

Menurut dia, antara hotel dan hiburan saling berkaitan satu sama lain. Penurunan pendapatan pajak hotel terjadi karena penyelenggaraan hiburan di Jakarta pun sedikit atau pindah lokasi. Minimnya acara hiburan dengan melibatkan jumlah penonton yang besar di Jakarta, secara otomatis juga berdampak terhadap penyewaan kamar hotel.

"Kenapa hotel itu turun? karena akupansi hotel di DKI Jakarta turun 5 persen itu yang jadi asumsi kita bahwa terjadi penurunan hotel, terus hiburan. Hiburan itu ada kegiatan hiburan yang tadinya di Jakarta pindah ke Bali ke Tangerang ke Sentul," kata dia.

Faisal menambahkan, Jakarta tidak memiliki tempat besar untuk kegiatan hiburan. Meski ada stadion utama Gelora Bung Karno (GBK), menurut Faisal, tempat itu difungsikan untuk kegiatan olahraga bukan kegiatan hiburan. "GBK kalau (tempat dengan fungsi) olahraga enggak bisa dipakai seperti itu terus jadi harus punya tempat," tutup dia.

Sementara itu, Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi ikut mempertanyakan realisasi pajak 2019 yang minim. Tak hanya itu, politisi PDI Perjuangan itu juga merasa bahwa penetapan target pajak masih rendah dari tahun ke tahun.

"Pajak rokok dari awal (target-red) Rp600 miliar, dari dulu begitu. Padahal kalau ditingkatkan bisa, PBB (Pajak Bumi dan Bangunan-red) ya kan turun juga," kata Prasetyo kepada INDOPOS di DPRD, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (26/11/2019).

Berdasarkan data, lanjutnya, untuk

pajak rokok memiliki target sebesar Rp620 miliar, lalu realisasi per 26 November Rp533,11 miliar yang berarti masih selisih Rp86,8 miliar.

Kemudian, untuk PBBKB ditargetkan Rp1,27 triliun, realisasi per 26 November Rp1,15 triliun dengan selisih Rp122 miliar.

Selanjutnya, Pras juga menyoroiti pajak parkir yang menurun. Ia pun meminta agar Badan Pendapatan dan Retribusi Daerah (BPRD) DKI Jakarta agar memanggil seluruh pengelola parkir di DKI Jakarta dipanggil.

"Nanti setelah pembahasan komisi panggil itu yang punya parkir di republik Jakarta. Ini (pendapatan pajak parkir) lebih enggak mungkin kurang. Di bawah proxy saja sampai keluar-keluar. Itu tanggung jawab ke mana. Tolong diterjunkan petugas ya Pak Faisal (Kepala BPRD-red), Jakarta bisa bertambah tapi kita defisit," tambah Pras.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Abdurrahman Suhaimi, dalam sejarah anggaran pihaknya tidak pernah melihat adanya proyeksi anggaran yang tiba-tiba turun. "Di mana-mana tren pajak itu naik, ini ko bisa turun, tolong jelaskan," ucap politisi PKS itu. (aen)

TARGET PENDAPATAN

PAJAK 2019

Pajak hotel sebesar Rp1,8 triliun, realisasinya Rp1,5 triliun
Pajak hiburan sebesar Rp850 miliar, realisasi Rp743 miliar